

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2..1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Fay dalam Hendrojogi (2012:20) koperasi adalah perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Koperasi merupakan badan hukum yang beranggotakan perorangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama berlandaskan undang-undang dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Definisi Koperasi menurut UU No.17/2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong kemajuan ekonomi dengan berlandaskan pada undang-undang dan sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2.1.1.1 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan Peran Koperasi berdasarkan UU No.17/2012 Tentang Perkoperasian:

1. Membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut Kartasapoetra (2013:4), fungsi (peran dan tugas) Koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
2. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
3. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
4. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
5. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan beberapa fungsi tersebut pada dasarnya fungsi koperasi yaitu untuk meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar sehingga kualitas dan taraf hidup anggota koperasi semakin maju.

2.1.1.2 Prinsip Koperasi

Menurut Hendrojogi (2012:46) prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka
2. Pengawasan demokratis oleh anggota
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
4. Otonomi dan kemandirian (Independence)

5. Pendidikan, pelatihan dan penerangan
6. Kerja sama antar koperasi
7. Kepedulian terhadap masyarakat.

2.1.1.3 Perangkat Organisasi

Ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi beserta penjelasannya diatur dalam pasal 31 UU No. 17 Tahun 2012. Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas dan pengurus.

- 1) Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam perangkat organisasi koperasi. Rapat anggota juga merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi.
- 2) Pengawas Koperasi
Pengawas merupakan badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus.
- 3) Pengurus Koperasi
Pengurus dipilih dan diangkat melalui rapat anggota atas usul pengawas.

2.1.1.4 Manfaat Koperasi di Bidang Ekonomi

Manfaat koperasi di bidang ekonomi Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi :

1. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi diberikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.
2. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
3. Menumbuhkan motif bekerja yang berperikemanusiaan. Kegiatan tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
4. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.

5. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensinya dalam ekonomi (Anoraga, 2003), yaitu :

1. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menangani pengadaan dan penyaluran berbagai barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
2. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam kegiatan pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperassi sebagai orgnisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Koperasi ini berfokus pada proses produksi serta pendistribusian hasil produksi.
3. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggotanya secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum.

2.1.1.6 Sumber Modal Koperasi

Sumber Modal Koperasi Koperasi sebagai suatu organisasi yang lazim disebut sebagai perkumpulan orang-orang yang dalam kehidupannya tidak lepas dari pada menghimpun atau dapat dikatakan sebagai kegiatan memupuk modal. Koperasi sebagai badan hukum (diberikan oleh dan atas wewenang Departemen Koperasi) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, memperoleh hasil sebesar-besarnya dan menggunakan biaya sekecil kecilnya dan melayani pula kepentingan bukan anggota. Koperasi melakukan usaha dengan modal awal koperasi yang diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya.

Selain itu koperasi bisa juga memanfaatkan sumber-sumber modal lain, baik dari dalam maupun luar koperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian mewujudkan bahwa:

1. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.
2. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:
 - a. Hibah;
 - b. Modal Penyertaan;
 - c. modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggota;
 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau
 - d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rudianto (2010:6) modal koperasi terdiri dari: “Modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi”.

Berikut penjelasan mengenai modal tersebut:

1. Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

- a. Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh

setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis 14 simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.

- b. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.
- c. Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat, karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

2. Modal Sumbangan

Modal sumbangan adalah sejumlah barang atau uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

3. Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4. Cadangan

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

2.1.1.7 Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 4 yaitu;

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Sedangkan menurut Moh. Hatta, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun ekonomi nasional adalah tujuan dibangunnya sebuah koperasi. Dengan adanya koperasi, kebutuhan anggotanya dapat diperoleh dengan mudah sehingga membuat kesejahteraan anggota meningkat yang secara langsung dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat untuk memajukan ekonomi nasional.

2.1.2 Manajemen Koperasi

Menurut UU No.17/2012 tentang perkoperasian, tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapat dilakukan bila sumber daya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreatif (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh. Berikut ini adalah manajemen koperasi menurut UU No.17/2012 tentang perkoperasian:

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan kolektibilitas suara anggota sebagai pemilik organisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Anggota koperasi adalah pemilik dan

sekaligus sebagai pengguna jasa (identitas ganda anggota koperasi), merupakan ciri universal dari badan usaha koperasi, bila pemilik badan usaha dan pengguna jasa tidak identik, maka badan usaha tersebut bukanlah koperasi.

2. Pengurus-Pengurus

Pengurus-pengurus merupakan wakil dari anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan/mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota.

3. Tugas Pengurus

Pengurus memperbolehkan wewenang dan kekuasaan dari Rapat Anggota dan melaksanakan seluruh keputusan Rapat , Anggota tersebut guna memberikan manfaat kepada Anggota koperasi. Atas dasar itulah Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola dan menjalankan tugas-tugasnya

Selain itu Pengurus juga memiliki tugas lain dalam memberikan pelayanan kepada Anggota Koperasi dan masyarakat; mendelegasikan tugas kepada Manajer; meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan Anggota; meningkat penyuluhan dan pendidikan kepada Anggota; mencatat mulai dari sampai dengan berakhirnya masa ke Pengurusan Pengawasan dan Pengurus; dan mencatat masuk dan keluarnya Anggota.

4. Wewenang Pengurus

Wewenang pengurus ialah:

- a. Mewakili koperasi di dalam dan luar;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

5. Persyaratan Menjadi Pengurus

Mengingat begitu pentingnya dan strategisnya tugas Pengurus Koperasi, maka dalam memilih Pengurus Koperasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan bekerja;
- b. Percaya pada koperasi, mengadakan inventarisasi dan aktif dalam usaha koperasi;
- c. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi;

- d. Dapat bekerjasama dengan Pengurus lainnya sebagai sebuah tim (kompak), dan menyokong keputusan-keputusan yang diambil dengan suara terbanyak;
- e. Tidak memberi keistimewahan khusus bagi dirinya sendiri, saudara-saudaranya atau kawan-kawannya;
- f. Tidak membocorkan rahasia organisasi, dan;
- g. Mempunyai wawasan yang luas serta mempunyai pikiran maju untuk mengembangkan ide baru yang dapat membawa keberhasilan koperasi serta berani mencoba;
- h. Mempunyai tekad yang bulat untuk mengabdikan dan mengembangkan koperasi dan lain sebagainya.

6. Fungsi Pengurus

Pengurus mempunyai fungsi ideal (*ideal function*), dan karenanya Pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu:

- a. Fungsi Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi dapat diwujudkan dalam bentuk: menentukan tujuan organisasi merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan.
- b. Fungsi sebagai penasihat, fungsi sebagai penasihat ini berlaku, baik terhadap para Manajer, karyawan, maupun bagi para anggota-anggota.
- c. Fungsi sebagai Pengawas adalah Pengurus memiliki kepercayaan dari anggota untuk mengatasi, menertibkan dan melindungi semua kekayaan organisasi.
- d. Fungsi sebagai Penjaga Kelangsungan Hidup Organisasi, agar organisasi tetap berlanjut, maka pengurus harus:
- e. Mampu menyediakan adanya eksekutif/Manajer yang cakap dalam organisasi;
- f. Perlu menyeleksi eksekutif atau manajer yang efektif;
- g. Memberikan pengarahan kepada para eksekutif/Manajer;
- h. Mengusahakan adanya Pengurus yang terdiri dari orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan organisasi;
- i. Mengikuti perkembangan pasar. Dengan demikian mereka bisa dengan tepat mengarah jenis barang-barang atau jasa-jasa apa yang akan dihasilkan oleh koperasi tersebut, sesuai dengan perkembangan permintaan di pasar dengan memperhatikan profitabilitas usaha;
- j. Fungsi sebagai simbol merupakan simbol dari kekuatan, kepemimpinan dan sebagai motivator bagi

tercapainya tujuan organisasi. Maka, Pengurus seharusnya berperan untuk:

1. Menentukan tujuan organisasi, strategis perusahaan (corporate strategies) dan kebijaksanaan umum dari organisasi.
 2. Dalam rangka usaha memperoleh informasi para eksekutif, yang dapat digunakan dalam perumusan kebijaksanaan, Pengurus perlu mengajukan pertanyaan secara cermat kepada eksekutif. Memilih dan mengangkat eksekutif-eksekutif kunci.
7. Rapat-Rapat Pengurus
- Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengurus koperasi dalam mengelola koperasi adalah menyelenggarakan Rapat Pengurus secara rutin.

2.1.3 Laporan Keuangan

Pada setiap akhir tahun, perusahaan atau lembaga termasuk koperasi menyusun laporan yang untuk membantu dalam pengambilan keputusan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini merupakan pengertian laporan keuangan yang penulis kutip dari beberapa sumber:

Menurut Irham Fahmi (2012:21), “Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Kasmir (2012:7), dalam pengertian yang sederhana ia menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah “Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sedangkan menurut Riyanto (2012:327), laporan keuangan (*Financial Statement*), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana Neraca (*Balance Sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan untuk perusahaan/koperasi merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat oleh perusahaan tentunya memiliki tujuan yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Berikut merupakan beberapa tujuan laporan keuangan yang dikutip dari beberapa ahli:

Menurut Kasmir, dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” (2012:11), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan juga aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Sedangkam Fahmi (2012:24), “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam suatu moneter.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan

segala informasi tentang kondisi suatu perusahaan yang dari sudut angka laporan keuangan.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut Fraser dan Orminston dalam (Fahmi,2015:22) Suatu laporan tahunan corporate terdiri dari empat laporan keuangan pokok yaitu :

1. Neraca menunjukkan posisi keuangan - aktiva, utang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun.
2. Laporan Rugi-Laba menyajikan hasil usaha-pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
3. Laporan ekuitas Pemegang saham merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan saldo laba, sering kali dikombinasikan dengan laporan laba-rugi yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir akun saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memilih format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.
4. Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode akuntansi.

Menurut Kasmir (2016:28), laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti:

1. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan). Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu.
2. Laporan Laba Rugi menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periodetertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang

telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.

3. Laporan Perubahan Modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki Perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebab-nya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.
5. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

2.1.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan

Untuk memperoleh ukuran-ukuran hubungan, ataupun informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai posisi keuangan perusahaan dan membantu proses pengambilan keputusan maka perlu dilakukan analisa laporan keuangan.

Menurut Sujarweni (2017:42) ada 3 macam teknik analisis laporan keuangan yang dapat dibuat seperti dibawah ini:

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukan:
 - a. Perbandingan jumlah-jumlah akun beberapa periode dalam rupiah.
 - b. Kenaikan atau penurunan akun beberapa periode dalam jumlah rupiah.
 - c. Kenaikan atau penurunan akun beberapa periode dalam persentase.
 - d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio dalam beberapa periode.

- e. Persentase dalam total aktiva maupun passive dalam beberapa periode.

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan-perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

2. Analisis Trend

Analisis Trend adalah analisis yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. Suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui kecenderungan keuangan perusahaan naik atau turun, dengan demikian akan dapat diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisis.

3. Analisis *Common Size*

Analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba-rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan (untuk laporan laba-rugi) atau dari total aktiva (untuk neraca). Laporan keuangan dalam persentasi per-komponen (*Common-size statement*) menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya.

2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan

Analisis Rasio menggambarkan hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan/koperasi (Munawir, 2014:64).

Menurut Kasmir (2015:104) menyatakan bahwa, analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan

keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan kegiatan yang membandingkan jumlah perhitungan dalam suatu laporan keuangan dengan menggunakan alat analisa yang berupa rasio perhitungan keuangan.

2.1.4.1 Manfaat Rasio Keuangan

Menurut Fahmi (2014:64) adapun manfaat analisis rasio keuangan adalah:

1. Untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
2. Sebagai rujukan untuk membuat perencanaan bagi pihak manajemen.
3. Sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
4. Bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

2.1.4.2 Rasio dalam Laporan Keuangan

a. Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2014:115). Berikut ini adalah rumus untuk mengukur rasio rentabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006:

$$1. \quad \text{Net profit margin} = \frac{SHU}{\text{Pendapatan}}$$

$$2. \quad \text{Return on total assets (ROA)} = \frac{SHU}{\text{Total Aktiva}}$$

$$3. \quad \text{Return on equity (ROE)} = \frac{SHU}{\text{Modal Sendiri}}$$

b. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 2014:115). Berikut ini adalah rumus untuk mengukur rasio aktivitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006:

$$1. \quad \text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Pendapatan}}{1/2 \text{ saldo piutang}} \times 1 \text{ kali}$$

$$2. \quad \text{Asset Turn Over} = \frac{\text{Volume Usaha}}{\text{asset}} \times 1 \text{ kali}$$

$$3. \quad \text{Transaksi Usaha Koperasi dengan Usaha Anggota} = \frac{\text{Transaksi anggota terhadap koperasi}}{\text{total transaksi seluruhnya}} \times 100\%$$

2.1.5 Kinerja Keuangan

Untuk memutuskan dan menilai suatu koperasi memiliki kualitas yang baik terdapat dua acuan yang paling dominan yang dapat dilakukan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2014)

Menurut Rudianto (2013) Kinerja keuangan yaitu hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu priode tertentu yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Sucipto, 2008),

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada waktu tertentu yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang dicapai dalam periode tertentu.

Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya tercermin dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya) ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu.

Menurut Fahmi (2014) terdapat 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan,
2. Melakukan perhitungan,
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitung yang telah diperoleh,
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan,
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

2.1.5.1 Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Mulyadi (2009) adalah sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Munawir (2012) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang - hutangnya tepat pada waktunya.

Dari pengertian kinerja keuangan di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa pengukuran kinerja keuangan penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, dan untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas dalam suatu perusahaan/koperasi.

2.1.6 Analisis Kinerja Keuangan Koperasi

Analisis kinerja keuangan koperasi adalah suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu koperasi dengan cara menguraikan komponen - komponen pembentuknya sehingga dapat terlihat gambaran tentang kondisi keuangan koperasi yang dicapai dalam periode tertentu. Pada dasarnya koperasi memiliki standar penilaian kinerja tersendiri yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang perkoperasian. Analisis Kinerja dilakukan dengan menilai aspek-aspek dan indikator-indikator yang sudah ditentukan dalam peraturan, yang menunjukkan bahwa kinerja koperasi menyatakan kondisi sehat, cukup sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat.

Tabel 2.1
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006

No	Aspek dan Cara Perhitungan dan Nilai Faktor	
1	Return on Equity	21% nilai=100 kriteria sangat baik 15% s.d <21% nilai=75 kriteria baik 9% s.d <15% nilai=50 kriteria cukup baik 3% s.d <9% nilai=24 kriteria kurang baik <3% nilai=0 kriteria tidak baik
2	Return on Asset	10% nilai=100 kriteria sangat baik 7% s.d <10% nilai=75 kriteria baik 3% s.d <7% nilai=50 kriteria cukup baik 1% s.d <3% nilai=50 kriteria kurang baik <1% nilai=0 kriteria tidak baik
3	Net Profit Margin	15% nilai=100 kriteria sangat baik 10% s.d <15% nilai=75 kriteria baik 5% s.d 10% nilai=50 kriteria cukup baik 1% s.d <5% nilai=25 kriteria kurang baik

		<1% nilai=0 kriteria tidak baik
4	Perputaran Piutang	12 kali nilai=100 kriteria sangat baik 10 kali s.d <12 kali nilai=75 kriteria baik 8 kali s.d <10 kali nilai=50 kriteria cukup baik 6 kali s.d <8 kali nilai=25 kriteria kurang baik <6 kali nilai=0 kriteria tidak baik
5	Asset Turn Over	3,5 kali nilai=100 kriteria sangat baik 1,5 kali s.d <3,5 kali nilai=75 kriteria baik 1,5 kali s.d 2,5 kali nilai=50 kriteria cukup baik 1 kali s.d 1,5 kali nilai=25 kriteria kurang baik <1 kali nilai=0 kriteria tidak baik
6	Transaksi Usaha Koperasi dengan Anggota Koperasi	90% nilai 100 kriteria sangat baik 75% s.d <90% nilai 75 kriteria baik 60% s.d <75% nilai 50 kriteria cukup baik 45% s.d <60% nilai 25 kriteria kurang baik <45% nilai 0 kriteria tidak baik

Sumber: Warda, dkk, 2017.

2.1.7 Manajemen Piutang

Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan menguntungkan perusahaan/koperasi karena lebih menarik bagi calon pembeli sehingga volume penjualan meningkat yang berarti menaikkan pendapatan perusahaan.

Di lain pihak penjualan secara kredit seringkali mendatangkan kerugian, yaitu apabila si debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan/koperasi dari tangan konsumen/anggota koperasi. Sistem manajemen piutang yang

baik akan menghindarkan koperasi/perusahaan dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen.

Kebijakan penjualan kredit yang akan menimbulkan piutang sebenarnya akan menimbulkan biaya bagi perusahaan/koperasi, seperti biaya administrasi piutang, biaya modal atas dana yang tertanam dalam piutang atau kredit, biaya penagihan dan biaya piutang yang mungkin tidak tertagih. Dari sini jelas bahwa piutang adalah beresiko tidak tertagih atau piutang akan menimbulkan masalah sebagai berikut :

1. Timbulnya piutang macet/tidak tertagih.
2. Meningkatnya beban bunga karena dana yang tertanam pada piutang macet.
3. Munculnya biaya penagihan dan administrasi.
4. Hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan.
5. Turunnya kepercayaan dari kreditor dan pemilik.

Maka dari itu perlunya fungsi dari manajemen piutang adalah untuk menghindari timbulnya masalah-masalah diatas. Berikut beberapa cara untuk menghindari masalah yang akan timbul, yaitu:

1. Melakukan penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung perusahaan/koperasi.
2. Mengukur jumlah simpanan anggota untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti utang jangka pendek yang harus segera dibayar.
3. Membuat klasifikasi kredit pada setiap anggota untuk menganalisa secara lengkap agar diketahui sejarah kredit setiap anggota apakah ada permasalahan atau lancar.
4. Melakukan seleksi kepada anggota dengan bantuan histori kredit yang telah lewat sebagai dasar penentuan jumlah maksimum yang diterima anggota berdasarkan jumlah simpanan, apakah ada penambahan, pengurangan atautkah tetap.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Ada beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai analisis laporan keuangan. Seperti yang dilakukan oleh Saraswati, dkk (2013) dalam jurnal " Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Koperasi", menyimpulkan bahwa berdasarkan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota, maka dalam pengelolaan badan usahanya KPRI Universitas Brawijaya Malang sangat penting untuk melakukan analisis laporan keuangan, karena dengan melakukan analisis laporan keuangan dapat diketahui kondisi keuangan koperasi yang bersangkutan, sehingga apabila diketahui kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dapat dilakukan pencegahan atau segera dievaluasi, hal tersebut dimaksudkan agar koperasi senantiasa tetap bertahan dan berkembang di dalam menjalankan kegiatan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Analisis yang dilakukan pada KPRI Universitas Brawijaya Malang menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas.
2. Sementara itu penelitian yang dilakukan Erindani (2014) dengan judul " Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Kencana Mulya" Kota Kediri", menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maka dalam pengelolaan keuangan sebaiknya KPRI "Kencana Mulya" secara rutin dapat melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio likuditas, solvabilitas dan rentabilitas. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan maka akan dapat diketahui apabila ada kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan sehingga dapat segera

diperbaiki. Selain itu pada periode berikutnya dapat dilakukan pencegahan dari kelemahan tersebut.

3. Tiga tahun berikutnya masih dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017) dalam jurnal " Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Swakerta pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jambi", menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas dikatakan pada rasio likuiditas bahwa manajemen tidak dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Current Ratio dapat dinyatakan buruk. Dengan diketahuinya kelemahan ini dapat segera diperbaiki dan untuk periode berikutnya dapat dilakukan pencegahan dari kelemahan tersebut.
4. Pada tahun yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Ward, dkk (2017) dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Koperasi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru", menyimpulkan bahwa berdasarkan rasio Likuiditas, Sovabilitas, dan Rentabilitas dikatakan sangat baik dan berpengaruh terhadap laba koperasi.

Persamaan penelitian sekarang adalah menggunakan data laporan keuangan pada perusahaan yang bergerak di bidang industri semen pada KPN Tuwuh periode 2014-2018. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah alat analisis yang digunakan hanya menggunakan dua rasio, yaitu Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas.